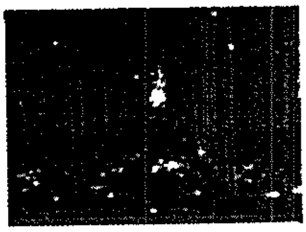

Prosiding

Seminar Hasil-Hasil Penelitian

Balai Litbang Teknologi Perbenihan
Bogor, 14 Pebruari 2006

BENIH PERHUTANAN
Membawa dan Dibawa Perubahan Pengelolaan Hutan

Oleh :
Sjamsoe'oed Sadjad
Guru Besar Emeritus IPB

1. *Pendahuluan*

Dalam hal benih tanaman, saya tidak mengenal beda antara benih tanaman pertanian dan perhutanan. Sebab, masalahnya sama. Bagaimana menghasilkan benih bermutu. Mengapa? Karena benih suatu bentuk kehidupan yang mengemban amanah. Apa? Memperpanjang dan mengembangkan spesiesnya. Jadi, bentuk kehidupan yang bermutu baik dan benar. Baik berarti sehat dan bersih, dan benar berarti harus jelas identitasnya, baik fisik, fisiologis maupun genetiknya. Untuk mencapai mutu demikian, teknologi diterapkan, dari teknologi yang sederhana sampai yang canggih. Tingkat teknologi menghasilkan tataran benih dengan mutunya. Di situ letak nilai dan harga benih.

Sementara itu teknologi pemuliaan tanaman juga berkembang dengan pesat. Baik yang konvensional maupun yang inkonvensional. Identitas genetik makin menyempit seirama dengan kemauan konsumen benih yang menghendaki pertanamannya lebih rampak-homogen. Kebutuhan akan benih produk teknologi makin membesar, sehingga menuntut proses pengadaan benih ditingkatkan dalam teknologi industrinya. Jumlah produksinya lebih besar, waktu berproduksinya makin singkat, dan mutunya dijaga tetap baik dan benar. Benih menjadi lebih komersial, sehingga diperlukan payung hukum yang melindungi konsumen dari ketidakbenaran informasi mutu.

2. Teknologi Pengadaan Benih versus Teknologi Pengelolaan

Dari buku suntingan Sudrajat S., Nurhasybi, dan Djoko Iriantono (1998)[1)] dapat dibaca bahwa dengan merujuk buku Suhaendi dan Rimbawanto (1994)[2)] arahan penelitian diprogramkan untuk lima hal, masing-masing Program Hutan Tanaman Kayu Keras, Program Hutan Tanaman Kayu Lunak, Program Hutan Tanaman Dipterocarpaceae, Program Hutan Tanaman Rakyat, dan Program Hutan Tanaman Non-Kayu. Dalam menulis makalah ini saya bertolak dari arahan itu, meski Pelita VI sudah tidak kebagian zaman lagi, mudah-mudahan arahan itu tetap berlaku.

Saya tetap memegang sebuah teori yang saya cetuskan, ialah Teori Kesejajaran, yang menyebutkan bahwa antara teknologi pengelolaan pertanian (dalam arti luas) dengan teknologi pengadaan benih sejajar. Bagi negeri kita ini yang begitu beragam kondisi alamnya, juga budaya masyarakatnya, dan juga beragam komoditi yang dikelolanya, maka pengadaan benih juga tidak bisa diseragamkan tingkat teknologinya. Kalau Teori kesejajaran ini saya jabarkan dalam wujud gambar matriks, maka terlihat pada Tabel 1. Saya rujukkan dari buku saya (Sadjad, 2006)[3)] yang bagi tulisan ini saya coba adaptasikan untuk kepentingan bidang perhutanan. Sesuai dengan teknologinya, tataran untuk pengadaan benih dapat saya kategorikan sebagai I sampai dengan V, dengan urutan teknologi yang paling minim, sederhana, madya, modern, dan canggih untuk kategori paling tinggi. Dalam teknologi pengelolaan hutan saya kira juga bisa diterapkan matriks ini.

Terdapat dalam Tabel 1, empat sudut masing-masing Primitif di sudut bawah-kanan, Transisi di sudut bawah-kiri, Standard di sudut atas-kanan, dan Modern di sudut atas-kiri. Huruf a, b, c, d, dan e adalah jabaran tanaman hutan yang dikelola. Kalau pengelolaan komoditi tanaman e masih sangat sederhana, maka teknologi pengadaan benihnya juga masih sangat sederhana. Komoditi e berada di garis diagonal yang menunjukkan "suiting

---

1) Sudrajat, S., Nurhasybi, dan Djoko Iriantono. 1989. Program Nasional Sistem Perbenihan Kehutanan. Balai Teknologi Perbenihan. Badan Litbang Kehutanan dan Perkebunan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 110 hlm.

2) Suhaendi, H. dan A. Rimbawanto. 1994. Program Penelitian dan Pengembangan Pemuliaan Pohon pada Pelita VI dari BP3BTH. Yogya.

3) Sadjad, S. 2006. Benih yang Membawa dan Dibawa Perubahan. IPB-Press-PT Pertani. 240 hlm.

line" atau teknologi pengadaan benih berada pada tataran pengelolaan hutan yang serasi teknologinya. Kalau kedua teknologi itu hendak diserasikan dalam pengembangannya, maka seyogyanya mengikuti garis diagonal sehingga sampai pada titik c. Jangan menjadi titik a yang pengelolaan hutannya sudah berteknologi modern, kondisi benihnya masih standar. Teknologi pengadaan benihnya harus ditingkatkan, sehingga sampai pada titik b. Sebaliknya akan terjadi seperti pada titik d, yang terus menerus berada pada transisi sehingga benih tidak laku terjual, dan industri benih akan jatuh.

Industri Benih / Pengelolaan Hutan		Tataran Teknologi				
		V	IV	III	II	I
Tataran Teknologi	V	b MO	DERN		. STAN	A DARD
	IV					
	III			c		
	II	TRA	NSISI		PRI	MITIF
	I	d				E

Tabel 1. Tataran Teknologi Pengadaan Benih versus Tataran Teknolgi Pengelolaan Hutan

Implikasi dari teori saya itu adalah sangat tidak tepat kalau sertifikasi benih merupakan ketentuan perundangan yang wajib bagi semua benih yang dilepas, dalam peredarannya, yang disebut Benih Bina. Seyogyanya sertifikasi itu disesuaikan dengan tataran teknologi yang digunakan pengelola. Misalnya, komoditi tanaman sengon untuk program hutan tanaman rakyat atau hutan non-kayu, bisa saja disertai sertifikat oleh lembaga yang berwenang, dengan informasi yang benar, baik pada labelnya maupun sertifikatnya, sebatas kemampuan mutunya. Proses ini merupakan proses pendidikan kepada masyarakat untuk bisa membaca informasi mutu benih dari label atau sertifikatnya. Bagi produsen benih juga merupakan pendidikan untuk mengetahui bahwa mutu benih produksinya bisa ditingkatkan dengan mempromosikan label yang beda dari label sebelumya.

3. Perhutanan versus Perkebunan

Dari kacamata teknologi pengadaan benih, saya melihat bahwa pengelolaan hutan dan perkebunan makin mendekat. Adanya Hutan Tanaman Industri jelas membenarkan penglihatan saya. Dengan adanya program pembukaan areal perkebunan kelapa sawit yang jutaan hektar, rasanya tidak wajar kalau program dilaksanakan tanpa mengikutsertakan program hutan rakyat dan non-kayu. Areal pertanaman kelapa sawit yang *nota-bene* relatif homogen di kawasan bekas hutan rasanya sangat rentan dipandang dari stabilitas ekologis. Karena itu sangat serasi kalau ada integrasi antara program perkebunan kelapa sawit itu dengan pengelolaan hutan. Kalau pandangan ini benar, tentu kedua program itu akan melibatkan rakyat. Untuk menyeimbangkan kedua kepentingan, yang kelapa sawit berada di sudut modern, maka untuk hutan rakyat atau hutan non-kayu harus bisa diusahakan posisi perbenihannya seperti pada titik c di Tabel 1, jangan masih seperti titik e.

Masyarakat di areal perkebunan atau perhutanan itu perlu mendapat pendidikan sehingga bermental industrial. Artinya, mereka memiliki pengetahuan tentang proses industrinya, memiliki target dalam kehidupannya, memiliki target waktu dalam berproduksi, dan target jumlah dan kualitas, mengupayakan sama-sama dengan proses industri untuk mendapatkan nilai tambah yang prospektif untuk kesejahteraannya. Desa industri dalam program perhutanan dan perkebunan itu merupakan suatu sistem, yang empat subsistemnya adalah industri CPO serta industri perkayuan, baik swasta maupun pemerintah, perbankan, badan litbang/universitas, dan koperasi. Subsistem kelembagaan itu menopang kegiatan desa industri, yang prosesnya akan melibatkan subsistem primer (benih, peralatan, pupuk, obat-obatan), subsistem sekunder (masyarakat dan koperasinya), dan subsistem tertier (swasta berindustri). Dengan membangun desa industri di area perhutanan dan perkebunan macam itu akan didapati terbentuknya budaya masyarakat yang baru yang semuanya itu dengan diwujudkan pendidikan masyarakat yang mantap dan berkelanjutan.

Merujuk buku saya (Sadjad, 2006)[4] saya gambarkan pola pemikiran pembangunan desa industri dengan subsistem vertikal dan horisontal dalam Gambar 1 yang terjadi integratif antara program perluasan kelapa sawit dan program hutan tanaman rakyat dan hutan non-kayu. Basis industrialnya sudah ada baik pada proses industri CPO maupun perkayuan rakyat, dan bukan mustahil juga kalau dari hutan non-kayu bisa dihasilkan industri pangan. Dengan wacana desa industri sebagai suatu sistem yang utuh ini, segenap masyarakat menjadi "commited" untuk mewujudkan kelestarian alam, baik spesies tanamannya, hewannya, dan manusianya dalam lingkungan hidup yang menyejahterakan.

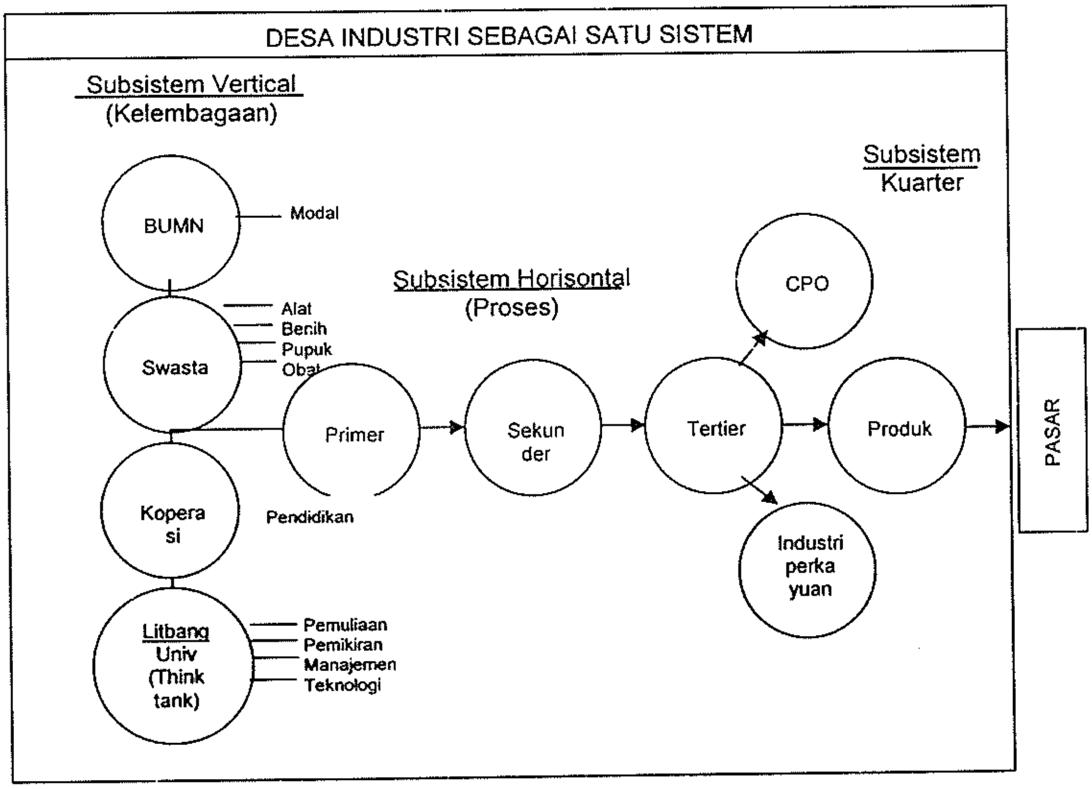

Gambar 1. Program Integratif antara Perluasan Areal Kelapa Sawit dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Non-Kayu ke dalam Pembangunan Desa Industri

[4] Ibid (5)

4. Penutup

Makalah saya ini diagendakan dalam seminar yang mulia ini sebagai "keynote". Saya mengharapkan tidak menjadi "juru kunci" tetapi bisa berfungsi sebagai "kunci" pembuka pintu yang masih tertutup, yang di dalamnya penuh "wild ideas" yang harus bisa ditelaah lebih mendalam lagi. "Keynote" ini jangan dianggap sebagai pengarahan, karena belum sempurna. Kalau bisa sebagai pembuka pikiran baru saja saya sudah "Alhamdulillah".

Dengan mengawali makalah menunjukkan kaidah perbenihan dan menunjukkan kemampuan benih sebagai "seeds of change" dengan meghadapkan tataran teknologi industri dan teknologi pengelolaan hutan, sekaligus juga bagaiman fleksibilitas benih sebagai "seeds of change". Maka betapa luasnya kita bisa melayani masyarakat dengan benih yang beragam mutu. Dengan bertolak dari pemikiran yang demikian saya beranikan untuk mengajukan gagasan membangun desa industri sebagai satu sistem yang basisnya industri kelapa sawit dan industri kayu hutan rakyat dan hutan non-kayu. Dari benih dan dengan benih kita bisa mewujudkan perubahan, dan pembangunan itu pada hakekatnya juga satu perubahan.

Semoga makalah ini berfaedah dan bisa membawa manfaat.

TERIMA KASIH

Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Saudara Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan dan rekan-rekan Panitia Seminar Hasil Litbang Teknologi Perbenihan yang telah memberi kesempatan berpartisipasi dalam seminar ini, yang berarti juga saya bisa kembali ke tengah-tengah Balai ini bersama-sama rekan-rekan saya yang jauh lebih muda turut berbincang-bincang tentang benih perhutanan. Semoga masih ada peluang di lain waktu.

Kampus IPB Darmaga, 2 Februari 2006.